

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pada kantor wilayah Sumatera Barat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alur proses penyidikan tindak pidana cukai oleh PPNS ini terdapat dalam PERKAP No. 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pelaksanaan penyidikan tersebut juga berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai, PERKAP No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai, dan PP No. 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.
2. Dalam proses penyidikan tindak pidana cukai, PPNS bea dan menemui hambatan berupa perlawanan (resistensi) dari masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan juga disebabkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya upaya paksa dari penyidik berupa penyitaan barang bukti yang dalam hal ini adalah rokok ilegal tersebut. Bukan hanya hambatan yang berasal dari masyarakat tapi juga berasal dari

pemerintahan berupa koordinasi dengan instansi lain terkait penelusuran aset dimana dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya birokrasi yang kompleks.

A. Saran

1. Perlu ditingkatkan peran serta dari masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana rokok tanpa cukai, dengan cara memberikan informasi tentang dugaan tindak pidana cukai kepada PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Berdasarkan pada informasi yang diberikan itu, PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dapat melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga upaya peredaran rokok ilegal dapat ditekan seoptimal mungkin
2. Perlu adanya penyederhanaan proses birokrasi dalam instansi pemerintahan guna mempermudah PPNS bea dan cukai untuk melakukan penelusuran aset tersangka sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyidikan tindak pidana.